

**LANSKAP LINGUISTIK LEMBAGA PEMERINTAH DAN SWASTA
DI KOTA SURAKARTA**

(Linguistic Landscape in Government and Private Institutions at Surakarta City)

Sri Wahyuni^a, Enita Istriwati^b, Ulinsa^c, & Asri M. Nur Hidayah^d

^{a,b,d}Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jl. Gatot Subroto Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

^cUniversitas Tadulako

Jalan Soekarno Hatta No. Km. 9, Tondo, 94118, Palu, Indonesia

Pos-el: yuni.bbajateng@gmail.com, akbareenita@gmail.com,

ulinsa.bahasaindonesia@gmail.com, asri007@brin.go.id

Naskah Diterima Tanggal 23 Agustus 2022; Direvisi Akhir Tanggal 17 November 2023;

Disetujui Tanggal 12 Desember 2023

DOI: <https://doi.org/10.26499/sawer.v29i2.1047>

Abstract

This research was motivated by the rise of writing in public spaces prioritizing something other than the state language. Surakarta City is an observation area because of its historical elements and rapid development. The purpose of this study is to describe the linguistic landscape and language misuse in public spaces of government and private institutions in Surakarta City. In this study, the researchers used observation and interview methods for collecting data. Researchers use descriptive methods to analyze the data. The results showed various language systems and language errors in the public space of Surakarta City. The language systems used are monolingual, bilingual, and multilingual. Monolinguals in Indonesian are widely used in government institutions, while private institutions commonly use them in English. The languages spoken are Indonesian, Javanese, English, and Arabic. Meanwhile, language errors are in the form of errors in writing letters, words, abbreviations, and punctuation. Local governments and every author writing in the inner public space can expect to find the results of this study useful. Therefore, the socialization of good language use must be more massive to increase public awareness of using language in public areas.

Keywords: *linguistic landscape; navigation; public space; language*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan maraknya tulisan di ruang publik yang kurang mengutamakan bahasa negara. Kota Surakarta menjadi daerah pengamatan karena unsur sejarah dan perkembangan kotanya yang pesat. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan lanskap linguistik dan kesalahan penggunaan bahasa pada ruang publik lembaga pemerintah dan swasta di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara untuk pengumpulan data. Data kemudian dianalisis melalui metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beragam sistem bahasa dan kesalahan berbahasa pada ruang publik Kota Surakarta. Sistem bahasa yang digunakan, yaitu monobahasa, dwibahasa, dan multibahasa. Monobahasa dalam bahasa Indonesia banyak digunakan pada lembaga pemerintah, sedangkan dalam bahasa Inggris banyak digunakan pada lembaga swasta. Bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Adapun, kesalahan berbahasa berupa kesalahan penulisan huruf, kata, singkatan, dan tanda baca. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dan setiap pembuat tulisan di ruang publik. Oleh karena itu, sosialisasi penggunaan bahasa yang baik harus lebih masif dilakukan supaya kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam menggunakan bahasa di ruang publik.

Kata-kata kunci: lanskap linguistik; navigasi; ruang publik; bahasa

PENDAHULUAN

Bahasa di ruang publik merupakan topik yang tampaknya tidak akan pernah selesai dikaji. Permasalahan kompetisi antara bahasa negara dan bahasa asing masih tetap ada dan terus berlanjut. Dadang Sunendar, Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa saat itu menyatakan bahwa Badan Bahasa hingga saat ini masih mengalami kesulitan menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik (Badan Bahasa, 2016). Dalam hal ini, karena tidak adanya pemberian sanksi atau denda untuk pelanggaran penggunaan bahasa (Maryanto, 2018), Badan Bahasa hanya dapat mengimbau dan menyarankan kepada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pengembang untuk lebih mengutamakan bahasa negara di ruang publik. Permasalahan ini juga menjadikan undang-undang (*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*, n.d.) maupun Peraturan Presiden (Pemerintah Republik Indonesia, 2019) seperti tidak bertaji. Undang-undang tersebut seolah tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan itu.

Dalam artikel ini, lanskap linguistik (LL) di Kota Surakarta dijadikan sebagai daerah pengamatan karena unsur sejarahnya yang menarik untuk diteliti. Apalagi, Surakarta hingga saat ini masih menjadi pusat kebudayaan Jawa di Jawa Tengah. Sejarah Surakarta berawal dari Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Saat itu wilayah kekuasaan Dinasti Mataram Islam terbagi menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Yogyakarta berdiri sendiri sebagai suatu provinsi dan Surakarta menjadi bagian wilayah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, pemisahan wilayah kekuasaan itu tetap menyisakan bukti-bukti hubungan yang erat antara Yogyakarta dan Surakarta, baik dari struktur tata kota, bahasa, maupun corak bangunan. Surakarta dan Yogyakarta memiliki banyak kesamaan karena berasal dari satu kebudayaan, yaitu budaya Jawa (Yogyakarta, 2021).

Dalam perkembangannya, Surakarta semakin menunjukkan modernitas meskipun tetap mempertahankan kekhasan budayanya. Gedung-gedung megah dan lalu lintas kendaraan tiada henti menunjukkan salah satu pesatnya kemajuan Surakarta. Pesatnya kemajuan Kota Surakarta tersebut otomatis berpengaruh terhadap lanskap linguistiknya, baik itu pada poster, iklan, nama instansi atau perusahaan, imbauan, larangan, maupun rambu-rambu jalan.

Lanskap linguistik Kota Surakarta ada yang sudah sesuai dengan kaidah bahasa, tetapi ada juga yang belum sesuai. Bahasa yang digunakan pun beragam. Sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia, ada juga bahasa Jawa, kemudian bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Dalam rangka pengutamaan bahasa negara, penggunaan bahasa Indonesia semestinya lebih diutamakan daripada bahasa lain. Meskipun bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan di ruang publik, tetapi penggunaannya diatur dalam undang-undang. Namun, sayang, produsen tulisan ruang publik banyak yang tidak mengetahui atau bahkan tidak mengindahkan undang-undang tersebut. Ketidaktahuan atau bahkan ketidakpedulian inilah yang kemudian memicu ketidakkonsistenan masyarakat dalam menggunakan bahasa di ruang publik. Kondisi kurang taat asas ini, tidak disadari telah menyebabkan terjadinya pendangkalan semangat nasionalisme.

Berdasarkan kondisi tersebut, ada dua masalah yang dikaji dalam artikel ini, yaitu 1) bagaimana LL lembaga pemerintah dan swasta di Kota Surakarta; 2) apa saja kesalahan berbahasa pada LL lembaga pemerintah dan swasta di Kota Surakarta. Tujuan penelitian ini, yaitu mendeskripsikan LL lembaga pemerintah dan swasta dan kesalahan berbahasa di Kota Surakarta. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah daerah dan pembuat tulisan lainnya sebagai masukan untuk mengambil kebijakan dalam upaya menjadikan tulisan pada ruang publik lebih berterima, bermartabat, taat peraturan, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Adapun, bagi masyarakat umum,

tulisan pada ruang publik dapat benar-benar bermanfaat sebagai markah tempat ‘*landmark*’ serta alat navigasi dan informasi yang tepat serta jelas.

Seiring dengan semakin maraknya penelitian tentang lanskap linguistik, artikel mengenai bahasa ruang publik itu pun semakin banyak ditulis oleh peneliti. Masing-masing menggunakan tinjauan dan data yang berbeda. Di Surakarta sendiri ada beberapa penelitian mengenai tulisan pada ruang publik. Beberapa di antaranya, yaitu Hendrastuti (2015), Purnanto, et al (2021), dan Widiyanto (2020). Hendrastuti (2015: 41) dalam artikelnya mengidentifikasi jenis-jenis variasi bahasa, penyimpangan, dan penyebab penyimpangan penggunaan bahasa negara pada lanskap linguistik Kota Surakarta. Hasil penelitiannya menyebutkan ada dua faktor penyebab penyimpangan tersebut, yaitu (i) faktor kesengajaan dan (ii) faktor ketidaksengajaan.

Kompetisi penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di ruang publik terdapat pada penamaan bisnis kuliner di Surakarta (Purnanto, et al, 2021: 357). Bahasa Inggris digunakan pada bidang ini karena dianggap sebagai simbol internasional yang modern dan eksklusif. Pendapat itu dikuatkan juga dengan penelitian lanskap linguistik (Widiyanto, 2020: 181) bahwa globalisasi memengaruhi penggunaan bahasa Inggris pada tanda atau rambu di Stasiun Solo Balapan Surakarta. Di Kota Medan juga terdapat kompetisi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (Sahril, 2019: 205).

Pendapat lainnya, Dasuki & Sholeh (2015: 265) menyatakan bahwa penggunaan bahasa dalam penamaan tempat usaha yang sesuai dengan kaidah dan kebijakan berbahasa merupakan salah satu bentuk sikap penghargaan dan sekaligus penghormatan terhadap bahasa Indonesia. Sejalan dengan itu, Fatmahwati (2019: 143) dalam artikelnya menuliskan bahwa makna nasionalisme dapat diwujudkan dengan rasa cinta pada tanah air, bahasa, dan budaya bangsa sendiri. Menurutnya, yang harus ditumbuhkan dalam permasalahan bahasa di ruang publik adalah rasa bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia.

Selanjutnya, Malik (2018: 87) mengatakan bahwa ruang publik adalah ruang

untuk kebutuhan publik dan menjadi tempat bertemunya beragam kepentingan publik. Ruang publik berfungsi untuk interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Biasanya ruang publik dibangun untuk umum dengan mensyaratkan adanya makna dan fungsi akses, kontrol, serta suara.

Setiap imbauan yang ditulis pada ruang publik merupakan bentuk representasi kekuasaan. Representasi tersebut berupa larangan, perintah, anjuran, sindiran, harapan, peringatan, dan ancaman (Wahyuni, 2016: 49). Dalam kajian jurnalisme, istilah *publik* semula memiliki makna kenengratan yang menunjukkan hak-hak istimewa bangsawan hingga kemudian berkembang, mendefinisikan publik sebagai kepentingan umum (Supriadi, 2017: 18). Namun, ruang publik yang seharusnya bersifat umum atau publik dapat juga berubah menjadi ruang privat. Beberapa kasus disebabkan adanya lonjakan aktivitas ekonomi, seni, dan budaya, serta sikap keamanan yang perlu diprioritaskan (Hantono & Ariantantrie, 2018: 48).

Penelitian mengenai keberadaan aksara Bali pada ruang publik telah dilakukan Artawa (2021) di Desa Kuta. Pengembangan industri pariwisata menyebabkan ruang publik desa tersebut telah berubah menjadi ruang yang multibahasa. Padahal pemerintah Bali telah mengeluarkan peraturan untuk menempatkan aksara Bali di atas tulisan yang menggunakan aksara atau huruf Latin (Artawa, 2019: 2).

Semua artikel ilmiah tersebut sangat bermanfaat sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini. Namun, belum ada artikel yang mengkaji lanskap linguistik di lembaga pemerintah dan swasta seperti nama jabatan, nama ruangan sebagai data penelitian. Lanskap di lingkungan kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, hotel, dan restoran, termasuk bagian dari ruang publik yang dapat dilihat dan diakses masyarakat umum. Oleh karena itu, selain untuk melengkapi penelitian lanskap linguistik, artikel ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan setiap pembuat tulisan di ruang publik supaya lebih mengutamakan bahasa negara dan lebih peduli dalam menerapkan kaidah bahasa.

KERANGKA TEORI

Istilah ruang publik '*public space*' pernah disampaikan oleh Lynch (Lynch, 1960: 41). Ia berpendapat bahwa ruang publik dapat dijadikan sebagai *nodes* dan *landmark*. Artinya, ruang publik dapat dijadikan semacam alat navigasi di dalam kota. Melalui tulisan-tulisan yang ada di ruang publik, masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai alat navigasi. Dengan demikian, semua tulisan yang ada pada ruang publik tentu harus jelas dan tepat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan informasi tersebut dengan mudah.

Dari ruang publik ini, muncul istilah lanskap linguistik '*linguistic landscape*' (LL). Istilah *linguistic landscape* ini pertama kali digunakan oleh Landry dan Bourhis pada 1997. Mereka mendefinisikan LL sebagai bahasa tulis yang terdapat pada tanda jalan umum, papan iklan, nama toko, nama jalan dan tempat, serta nama gedung pemerintah dalam sebuah kelompok wilayah (Landry & Bourhis, 1997).

Lanskap linguistik juga mengkaji mengenai visibilitas multibahasa di ruang publik. Selanjutnya, keunikan LL adalah tergantung cara kita membacanya. Lanskap linguistik tidak hanya indikator komposisi demografis tertentu, dan petunjuk yang cukup jelas mengenai multilingualisme masyarakat, tetapi LL dapat menjadi dokumen sejarah dari berbagai sejarah orang, dan komunitas. LL memiliki kompleksitas yang unik dan informatif (Blommaert, 2013)

Taksonomi Spolsky dan Cooper mengklasifikasikan delapan tanda pada ruang publik berupa: (1) tanda jalan; (2) iklan; (3) larangan; (4) nama gedung atau bangunan; (5) informasi; (6) peringatan; (7) objek; dan (8) grafiti (Spolsky & Cooper, 1991). Selain lanskap linguistik, artikel ini juga dianalisis berdasarkan kesalahan berbahasa yang meliputi (1) kesalahan penulisan huruf; berupa kesalahan penulisan huruf nonkapital, kapital, dan cetak miring; (2) kesalahan penulisan kata; berupa kesalahan penulisan kata dasar, kata turunan, gabungan kata, kata ulang, kata ganti, kata depan, partikel, singkatan dan akronim; (3) kesalahan penulisan tanda baca: meliputi kesalahan penulisan tanda titik, koma, tanda hubung/tanda pisah, tanda petik, tanda kurung,

garis miring; (4) Interferensi bahasa Inggris berupa kesalahan penggunaan bahasa Inggris dalam teks berbahasa Indonesia. Acuan yang digunakan untuk menentukan ejaan suatu kata benar atau salah dalam penelitian ini adalah *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) dan *Ejaan yang Disempurnakan V* (EYD V).

METODE

Data dalam artikel ini merupakan data kajian pengutamaan bahasa negara di ruang publik yang dilaksanakan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah pada 2020. Data tersebut meliputi nama lembaga dan gedung, fasilitas umum, ruang pertemuan, produk berupa barang dan jasa, nama jabatan, petunjuk arah atau rambu, dan alat informasi lain yang terdapat pada lima lembaga pemerintah dan enam lembaga swasta di Kota Surakarta. Total ada 101 sampel data yang diberi nomor berdasarkan urutannya. Data tersebut dikumpulkan pada Maret 2020 sebelum masa Covid.

Untuk pengumpulan data, metode observasi dan wawancara digunakan dalam penelitian ini. Metode observasi dipilih karena data yang dikumpulkan berupa bahasa tulis yang ada pada lanskap Kota Surakarta. Oleh sebab itu, harus dilakukan observasi di lapangan. Metode wawancara dilakukan untuk menggali lebih lengkap dan dalam mengenai latar belakang data yang dikumpulkan (Mulyana, 2013: 180).

Data tersebut kemudian dicatat dan didokumentasikan. Selanjutnya diamati, dipilih, dan dipilah berdasarkan pemilahan tertentu disesuaikan dengan sifat atau watak unsur penentu masing-masing (Sudaryanto, 2015: 26). Pemilahan data meliputi data yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya.

Hasil pemilahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif (Eriyanto, 2011). Data dianalisis berdasarkan sistem bahasa yang digunakan, baik itu secara monobahasa, dwibahasa, maupun multibahasa. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan jenis kesalahan berbahasa (Mahsun, 2005).

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam dua subbab, yaitu lanskap linguistik lembaga pemerintah dan swasta di Kota Surakarta dan kesalahan berbahasa pada lanskap linguistik Kota Surakarta.

Lanskap Linguistik Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kota Surakarta

Kondisi LL lembaga pemerintah dan swasta di Kota Surakarta tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 1.

Lanskap Linguistik Lembaga Pemerintah dan Swasta di Kota Surakarta

Klasifikasi	Monobahasa	Dwibahasa	Multibahasa	LP	LS	Jumlah
Nama gedung	BI			10	3	13
Nama gedung	BJ			1		1
Nama gedung		BI, BJ		4		4
Nama gedung		BI, B.Ing		1	4	5
Nama gedung		BI, BAL			1	1
Nama gedung	B.Ing				3	3
Informasi	BI			21	9	30
Informasi		BI, B.Ing		1	10	11
Informasi		BI, BAL			1	1
Informasi			BI, B.Ing, BAL		2	2
Informasi			BI, BJ, B.Ing, BAL	2		2
Peringatan	BI			4	1	5
Peringatan		BI, B.Ing			2	2
Peringatan	B.Ing				1	1
Peringatan			BI, B.Ing, BAL	1		1
Larangan	BI			1	1	2
Larangan	B.Ing				1	1
Tanda jalan	BI			1	3	4
Tanda jalan		BI, B.Ing			2	2
Tanda jalan			BI, B.Ing, BAL		1	1
Tanda jalan		BI, BAL		1		1
Tanda jalan	B.Ing				1	1
Tanda jalan		B.Ing, BAL			1	1
Iklan	BI			3	2	5
Iklan		BI, B.Ing			1	1
Iklan	B.Ing				1	1
Iklan		B.Ing, BAL			1	1

Keterangan:

LP: Lembaga Pemerintah

LS: Lembaga Swasta

BI: Bahasa Indonesia

BJ: Bahasa Jawa

B.Ing: Bahasa Inggris

BAL: Bahasa Asing Lain

Dari delapan tanda taksonomi menurut Spolsky dan Cooper, ada enam tanda linguistik yang ditemukan pada LL lembaga pemerintah dan swasta di Kota Surakarta. Keenam tanda tersebut meliputi nama gedung, tanda informasi, tanda peringatan, tanda larangan, tanda jalan, dan iklan. Adapun, berdasarkan sistem bahasa, ada beberapa variasi penggunaan bahasa pada LL di Kota Surakarta, yaitu monobahasa, dwibahasa, dan multibahasa. Sistem monobahasa didominasi dalam bahasa Indonesia, berikutnya dalam bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Sistem dwibahasa bervariasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa; bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; bahasa Indonesia dan bahasa Arab; serta bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sistem multibahasa menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab; dan empat bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab.

Pada tabel tersebut, juga terlihat bahwa sistem monobahasa dalam bahasa Indonesia pada nama gedung lembaga pemerintah sebanyak sepuluh tanda, sedangkan lembaga swasta sebanyak tiga tanda. Tanda informasi pada lembaga pemerintah yang menggunakan sistem monobahasa dalam bahasa Indonesia sebanyak 21 tanda dan lembaga swasta sebanyak sembilan tanda. Berikutnya, tanda informasi secara dwibahasa, yaitu variasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh lembaga swasta sebanyak sepuluh tanda dan lembaga pemerintah hanya ditemukan satu tanda. Selebihnya, yaitu tanda peringatan, larangan, iklan, dan tanda jalan. Kecuali pada tanda jalan, masing-masing tanda, yaitu peringatan, larangan, dan iklan menunjukkan bahwa lembaga pemerintah menggunakan bahasa Indonesia secara monobahasa lebih banyak dari pada lembaga swasta.

1) Monobahasa

Secara keseluruhan, tanda linguistik di Kota Surakarta yang menggunakan bahasa Indonesia secara monobahasa berjumlah 40. Tanda itu tampak pada contoh berikut ini.



Figur 1. Nama gedung



Figur 2. Nama gedung



Figur 3. Nama gedung



Figur 4. Nama gedung

Figur 1, 2, 3, dan 4 merupakan nama gedung yang menggunakan sistem monobahasa dalam bahasa Indonesia. Figur 1 dan 2 merupakan tanda nama gedung pada lembaga pemerintah. Adapun lembaga swasta yang

menggunakan sistem monobahasa dalam bahasa negara, terdapat pada figur 3 dan 4.

Tanda linguistik yang menggunakan bahasa dan huruf Jawa secara monobahasa terdapat pada contoh berikut ini.



Figur 5. Nama gedung

Sebagai pusat kebudayaan Jawa, bahasa dan tulisan Jawa pada ruang publik masih banyak digunakan di Surakarta. Tanda taksonomi berupa nama gedung dalam bahasa Jawa menunjukkan masih melekat dan kentalnya kebudayaan Jawa pada masyarakat Surakarta. Eksistensi ini dikokohkan pula dengan aksara dan tulisan Jawa pada bangunan yang merupakan peninggalan sejarah. Tanda itu tampak pada figur 5.

Sistem monobahasa dalam bahasa Inggris banyak ditemukan pada lembaga swasta, yaitu hotel, restoran, dan sekolah (Artawa et al., 2023). Kesalahan terbanyak yang ditemukan pada ruang publik Kota Surakarta, yaitu penggunaan bahasa Inggris yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Kesalahan ini juga banyak ditemukan di kota-kota besar lainnya. Ruang publik sebagai area publik seharusnya menjadi sarana untuk lebih mengutamakan bahasa negara daripada bahasa asing. Namun, kenyataannya banyak papan nama maupun papan informasi menggunakan bahasa asing terutama bahasa Inggris (Mahsun, 2015). Berikut ini beberapa contoh figur tersebut.



Figur 6. Informasi



Figur 7. Informasi



Figur 8. Informasi



Figur 9. Informasi

Figur 6 *BUSINESS CENTER & DRUGS STORE* menggunakan bahasa Inggris. Tanda

tersebut tampak tidak menggunakan bahasa negara, meskipun berada di wilayah Indonesia. Tanda ini ditemukan di hotel dengan pengunjung hotel baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, langkah yang bijak, untuk mengakomodasi kepentingan tersebut, yaitu tetap mengutamakan bahasa Indonesia lebih dulu, sebelum bahasa Inggris.

Nama jabatan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan terdapat pada figur 7. Figur tersebut menggunakan bahasa Inggris, *GUEST SERVICE MANAGER*. Sampai saat ini memang belum ada padanan yang benar-benar sesuai untuk beberapa jabatan manager di bidang perhotelan. Namun, upaya untuk mencari padanannya terus dilakukan. Contoh upaya tersebut, yaitu jabatan *GUEST SERVICE MANAGER* dapat juga diterjemahkan menjadi *MANAJER SERVIS PELANGGAN* sebagai padanan yang potensial dalam bahasa Indonesia.

Penempatan bahasa asing sebagai nama ruang pertemuan terdapat pada figur 8 dan 9, yaitu *Queen Hall* dan *Sidomukti Room*. Figur 8 *Queen Hall* menggunakan nama dalam bahasa Inggris, sedangkan *Sidomukti Room* menggunakan variasi nama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nama alternatif untuk menggantikan kedua data tersebut, yaitu Aula Ratu dan Ruang Sidomukti.

Salah satu alasan digunakannya bahasa asing pada lanskap linguistik di sekolah adalah sebagai tempat belajar dan mengajar bahasa. Beberapa fasilitas sering kali menggunakan bahasa asing seperti pada contoh berikut ini.



Figur 10. Informasi

Figur 10 berupa tulisan dalam bahasa Inggris *SHARE WITH US*, *SUGGESTION BOX*. Secara normatif, sesuai dengan *Ejaan Bahasa Indonesia V* kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau asing semestinya dicetak

miring (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2022). Namun, tidak banyak masyarakat yang mengetahui kaidah bahasa tersebut. Oleh karena itu, banyak tanda taksonomi di ruang publik tidak mengikuti pedoman yang telah berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat menganggap kedudukan bahasa asing sama bahkan lebih tinggi dibandingkan bahasa negara. Padahal, kedudukannya tentu saja berbeda (Mahsun, 2015). Cetak miring seharusnya menjadi penanda bahwa kata atau ungkapan tersebut merupakan bahasa asing bukan bahasa negara.

Penggunaan sistem monobahasa dalam bahasa Inggris di ruang publik Kota Surakarta juga terdapat pada figur 11 dan 12.



Figur 11. Nama gedung



Figur 12. Nama gedung

Penulisan nama *Syariah Hotel* menggunakan hukum MD (menerangkan diterangkan) yang merupakan pengaruh dari bahasa Inggris. Struktur bahasa Indonesia menggunakan hukum DM (diterangkan menerangkan). Dengan demikian, penamaan yang tepat untuk data tersebut, yaitu Hotel Syariah, bukan Syariah Hotel.

Figur 12 hanya menempatkan dan menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris pada nama lembaganya. Kedua data tersebut tidak menggunakan bahasa negara. Ukuran dan warna hurufnya pun tampak besar dan mencolok. Teks pada figur tersebut tentu tidak sejalan dengan kewajiban menggunakan bahasa negara pada nama lembaga usaha. Dalam *KBBI*, kata *bistro* dan *restaurant* telah diserap menjadi *bistro* dan *restoran*. Kata *bistro* memiliki makna '1. restoran kecil atau sederhana bergaya Prancis; 2. kedai minuman atau bar kecil' (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2021). Adapun, restoran memiliki makna 'rumah makan'. Keduanya mengacu pada makna yang sama, yaitu 'rumah makan atau restoran'. Dengan demikian, penggunaan dua kata *bistro* dan *restaurant* pada nama *Solo's Bistro Restaurant* merupakan pengulangan makna.

2) Dwibahasa

Beberapa variasi sistem dwibahasa pada lanskap linguistik Kota Surakarta, yaitu meliputi variasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa; bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; bahasa Indonesia dan bahasa Arab; serta bahasa Inggris dan bahasa Arab.

a) dwibahasa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa

Berikut ini merupakan tanda linguistik yang menggunakan sistem dwibahasa variasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.



Figur 13. Nama gedung



Figur 14. Nama gedung



Figur 17. Tanda jalan



Figur 15. Nama gedung

Upaya pengutamaan bahasa negara pada figur 13, 14, dan 15 tampak pada penggunaan ukuran huruf yang lebih besar dan warna lebih tebal pada nama dalam bahasa negara. Bahasa dan aksara Jawa pada tanda taksonomi ini digunakan untuk menunjukkan Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa. Figur 13, 14, dan 15 ini merupakan salah satu upaya pemerintah Surakarta untuk melestarikan bahasa dan budaya Jawa.

b) dwibahasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris

Berikut ini merupakan tanda linguistik yang menggunakan sistem dwibahasa variasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.



Figur 16. Tanda jalan



Figur 18. Informasi

Pada figur tersebut tertulis *TEMPAT PARKIR BASEMENT-PARKING AREA*. Kata *BASEMENT* dan *PARKING AREA* merupakan bahasa Inggris. Ukuran dan warna huruf kata *BASEMENT* lebih jelas, tebal, dan menonjol, sedangkan *PARKING AREA* juga terlihat lebih jelas karena latar yang lebih terang. Figur ini tidak termasuk dalam variabel fisik kebahasaan yang mendukung pengutamaan bahasa negara. Kata *BASEMENT* telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu *LANTAI DASAR*. Adapun *PARKING AREA* tidak perlu lagi dicantumkan karena merupakan padanan dari *TEMPAT PARKIR*. Strategi yang tepat untuk mendukung pengutamaan bahasa negara di ruang publik, namun tetap menampilkan bahasa Inggris, yaitu dengan membuat ukuran huruf dalam bahasa Inggris lebih kecil dan warna hurufnya pun tidak menonjol dibandingkan bahasa negara.



Figur 19. Iklan

Figur 19 juga menempatkan bahasa Inggris, *Meeting Room* dan *Rest Room* untuk menyebut nama ruangan sebagai tanda informasi. Posisi tulisan *Meeting Room* bahkan diletakkan pada posisi paling atas sebelum informasi nama ruangan. Terjadi penyimpangan struktur pada nama tersebut. Jika menggunakan struktur bahasa Inggris, seharusnya menggunakan hukum MD (menerangkan diterangkan). Frasa *Meeting Room* yang berfungsi sebagai *diterangkan* seharusnya diletakkan setelah nama ruangan yang berfungsi *menerangkan*. Namun, upaya paling baik pada tulisan ruang publik, yaitu menggunakan struktur dan nama dalam bahasa negara. Oleh karena itu, *Ruang Pertemuan* dan *Ruang Rehat* memiliki konsep dan makna yang sama dan sesuai untuk menerjemahkan *Meeting Room* dan *Rest Room*.

Faktor kurangnya kebanggaan berbahasa negara menjadi salah satu sebab penting digunakannya bahasa Inggris daripada bahasa negara. Alasan ini juga relevan dengan sikap kurangnya kesetiaan pada bahasa negara. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dianggap lebih prestise. Kurangnya kebanggaan berbahasa negara juga menunjukkan kurangnya kepercayaan diri bangsa kita terhadap bahasa Indonesia sehingga lebih memilih menggunakan bahasa asing (Assapari, 2014). Bahkan nama-nama menu makanan pada figur 19 ditulis dengan nama-nama asing. Sikap seperti ini sebaiknya ditinggalkan untuk memperkuat kebanggaan terhadap bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia.

Contoh yang bijak dalam penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing di ruang

publik tampak pada figur berikut ini.



Figur 20. Peringatan

Tanda peringatan pada figur 20 menempatkan bahasa Indonesia lebih dulu dan menggunakan ukuran huruf lebih besar, kemudian bahasa asing ditempatkan di bawah bahasa negara dengan ukuran huruf lebih kecil. Bahasa asing sebaiknya dicetak miring.

c) dwibahasa bahasa Indonesia dan bahasa Arab

Sistem dwibahasa variasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab pada lanskap linguistik lembaga swasta di Surakarta terdapat pada contoh figur berikut ini.



Figur 21. Informasi

Pada figur 21, bahasa Indonesia digunakan bervariasi dengan bahasa dan huruf Arab sebagai tanda informasi nama ruangan. Figur 21 menunjukkan, selain bahasa Inggris, bahasa Arab juga memiliki pengaruh sangat kuat pada LL Kota Surakarta. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga bahasa Arab banyak digunakan pada tanda linguistik di Kota Surakarta.

d) dwibahasa bahasa Inggris dan bahasa Arab.

Sistem dwibahasa variasi antara bahasa Arab dan bahasa Inggris pada lanskap linguistik lembaga swasta di Surakarta terdapat pada contoh figur berikut ini.



Figur 22. Informasi



Figur 23. Informasi

Figur 22 tidak menggunakan bahasa negara, tetapi menggunakan bahasa dan tulisan Arab serta bahasa Inggris, *School Health Unit*. Sesuai dengan tujuan pengutamaan bahasa negara, tentu saja yang paling utama tetap menggunakan bahasa negara. Meskipun penggunaan bahasa asing tidak dilarang di ruang publik, penempatannya harus disesuaikan dengan kaidah kebahasaan di ruang publik, yaitu ditempatkan di bawah bahasa negara, ukuran huruf yang digunakan lebih kecil, dan warna huruf tidak lebih mencolok dibandingkan warna huruf bahasa negara. Dengan demikian, nama sarana umum yang tepat untuk figur 22, yaitu *Unit Kesehatan Sekolah* atau istilah yang telah banyak digunakan oleh masyarakat, yaitu *Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)*. Selanjutnya, figur 23 hanya menempatkan bahasa asing sebagai nama penunjuk arah. Dalam upaya pengutamaan bahasa negara, kata *PINTU MASUK* seharusnya lebih utama digunakan daripada kata asing *ENTRANCE*.

3) Multibahasa

Sistem multibahasa pada LL Kota Surakarta menggunakan tiga bahasa, yaitu variasi antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab; dan empat bahasa, yaitu variasi antara bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab

a) multibahasa dalam tiga bahasa

Sistem multibahasa dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab pada lanskap linguistik Kota Surakarta terdapat pada figur berikut ini.



Figur 24. Nama gedung

Selain sebagai pusat kebudayaan Jawa, Surakarta juga memiliki kedekatan dengan budaya Islam. Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di Yogyakarta telah banyak memengaruhi budaya dan tradisi masyarakat Surakarta. Oleh karena itu, selain bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa Arab juga sering digunakan di ruang publik Kota Surakarta.

b) multibahasa dalam empat bahasa

Sistem multibahasa dalam empat bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab pada lanskap linguistik lembaga swasta di Surakarta terdapat pada contoh figur berikut ini.



Figur 25. Informasi



Figur 27. Peringatan



Figur 26. Informasi

Frasa *Berani JUJUR* pada figur 27, ditulis bervariasi antara nonkapital dan kapital. Kata *Berani* hanya huruf depan saja kapital, sedangkan kata *JUJUR* semua huruf ditulis kapital. Penggunaan huruf kapital pada kata *JUJUR* berfungsi untuk menekankan dan menonjolkan kata tersebut. Namun, berdasar kaidah kebahasaan, kedua kata tersebut sebaiknya ditulis sama, yaitu huruf di awal kata ditulis kapital atau semua huruf kapital.

Seiring dengan era globalisasi, tak dapat dipungkiri jika banyak sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang berlomba mengajarkan bahasa asing pada siswa atau murid. Pengajaran bahasa asing itu tentu memengaruhi sikap berbahasa mereka di mana pun, termasuk di ruang publik. Sekolah-sekolah berstandar internasional seringkali memilih menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia pada ruang publik.

Pada dasarnya, masyarakat tidak dilarang menggunakan bahasa asing, tetapi lebih mengutamakan bahasa negara di ruang publik merupakan keniscayaan yang perlu dilakukan.

Kesalahan Tulisan di Ruang Publik

Ada lima jenis kesalahan tulisan pada lanskap linguistik Kota Surakarta, yaitu penulisan huruf, penulisan kata, pemilihan kata, dan tanda baca.

1) Kesalahan Penulisan Huruf

Contoh kesalahan penulisan huruf di ruang publik terdapat pada figur berikut ini.

2) Kesalahan Penulisan Singkatan

Ketidaktepatan penulisan singkatan termasuk dalam kesalahan penulisan kata. Contoh kesalahan itu terdapat pada figur 31, 32, dan 33.



Figur 28. Nama gedung



Figur 29. Informasi



Figur 30. Informasi

Papan nama instansi sangat penting karena selain sebagai identitas, papan nama tersebut juga sering dilihat masyarakat. Keberadaannya memiliki dampak yang besar sebagai penanda suatu instansi. Pada figur 28, *Surakarta* disingkat menjadi *Ska*. Dalam penulisan alamat, apalagi papan nama instansi pemerintah, penyingkatan ini tentu tidak informatif. Langkah yang tepat, menuliskan nama kota secara lengkap. Selain itu, objek penulisan nama jalan dan kota dipisahkan oleh nomor telepon. Penulisan tersebut tidak tepat karena nomor telepon bukan bagian dari alamat. Sebaiknya antara nama jalan dan nama kota tidak dipisahkan oleh nomor telepon. Penulisan yang tepat untuk figur 28 sebagai berikut.

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)
SMP NEGERI 7 SURAKARTA
Jalan Mister Sartono 34, Surakarta
Telepon (0271) 852674

Huruf R pada figur 29 merupakan singkatan dari kata *Ruang*. Kata *ruang* sebaiknya tidak disingkat karena itu merupakan papan nama yang berfungsi sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk, papan nama tersebut haruslah jelas dan informatif. Dengan demikian, kesalahan informasi tidak akan terjadi.

Nama jabatan *DIREKTUR ADMINKU* pada figur 30 sebaiknya tidak disingkat. Penyingkatan itu dapat berpotensi menimbulkan kerancuan bagi pembaca karena nama jabatan termasuk bagian dari ruang publik yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat umum. Suku kata *-KU* pada jabatan *DIREKTUR ADMINKU* merupakan singkatan dari kata

KEUANGAN. Oleh karena itu, nama jabatan tersebut sebaiknya ditulis lengkap menjadi *DIREKTUR ADMIN KEUNGAN*.

3) Kesalahan Pemilihan Kata

Kesalahan pemilihan kata terdapat pada figur berikut ini.



Figur 31. Informasi



Figur 32. Informasi



Figur 33 Informasi

Ada tiga variasi penulisan kata *musala* pada figur 31, 32, dan 33 yaitu *Mushola*, *Moshalah*, dan *Musholla*. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa kata *Mushola*, *Moshalah*, dan *Musholla* berasal dari bahasa Arab. Kata yang merujuk pada makna tersebut sebenarnya telah ada dalam KBBI dan telah disesuaikan pelafalannya dalam bahasa Indonesia. Penulisan yang tepat, yaitu *musala* (Kementerian

Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2021). Oleh karena itu, kata yang seharusnya digunakan, yaitu *musala*.



Figur 34. Informasi

Pada figur 34 tertulis *WUDLU*. Bahasa Indonesia tidak memiliki deret konsonan */dll/*. Oleh karena itu, sesuai dengan *KBBI*, penulisan yang benar adalah *wudu* (Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 2021).

4) Kesalahan Tanda Baca

Kesalahan penulisan tanda baca terdapat pada figur berikut ini.



Figur 35. Informasi

Penulisan singkatan gelar *Magister Pendidikan* yang tepat seharusnya *M.Pd.*, tidak ada tanda titik (.) pada gelar tersebut (Sasangka, 2018). Selain itu, kata *Madrasah* seharusnya tidak ditulis lagi pada jabatan karena *MTs* merupakan singkatan dari *Madrasah Tsanawiyah*. Nama jabatan pada data tersebut tidak efektif. Nama jabatan yang tepat, yaitu

Drs. H. Kirno Suwanto, M.Pd.
Kepala MTs Negeri 1 Surakarta

Penyimpangan ini juga banyak terjadi pada nama *bank*. Nama *bank* seringkali ditulis atau disebutkan secara lisan dua kali, contohnya yaitu: Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA. Singkatan BRI, BCA, BNI telah memuat kata *bank*. Jadi, seharusnya penulisan kata *bank* tidak perlu dilakukan lagi.

PENUTUP

Penggunaan bahasa negara dan bahasa asing di ruang publik sering kali berbenturan dengan berbagai alasan. Baik itu karena alasan praktis, prestise, maupun edukasi. Meskipun penggunaan bahasa asing tidak dilarang tetapi penggunaan bahasa negara di ruang publik semestinya lebih diutamakan.

Ada tiga sistem bahasa, yaitu secara monobahasa, dwibahasa, dan multibahasa pada lanskap linguistik lembaga pemerintah dan swasta di Kota Surakarta. Bahasa-bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Bahasa Indonesia paling banyak digunakan pada nama gedung lembaga pemerintah, sedangkan bahasa Inggris paling banyak digunakan pada nama gedung lembaga swasta. Bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan setelah bahasa Indonesia.

Kesalahan berbahasa dalam segi kaidah juga masih ditemukan pada ruang publik Kota Surakarta, yaitu kesalahan dalam penulisan huruf, kata, singkatan, dan tanda baca.

Oleh karena itu, undang-undang dan kaidah berbahasa terkait penggunaan bahasa di ruang publik harus terus disosialisasikan dan direalisasikan. Selain itu, perlu ada sinergi kebijakan dan edukasi yang melibatkan beberapa instansi baik itu pemerintah maupun swasta. Pemberian sanksi perlu juga ditegakkan untuk menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara serta menjadikan bahasa Indonesia lebih utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Artawa, K. (2019). *Balinese in Public Spaces in the Context of Tradition and Globalization: a Linguistic Landscapes Study in Kuta Village. First Malay Semiotics Seminar.*
- Artawa, K., Mulyanah, A., Atmawati, D., Paramarta, I. M. S., Satyawati, M. S., &

- Purnawati, K. W. (2023). Language Choice and Multilingualism on Restaurant Signs: A Linguistic Landscape Analysis. *International Journal of Society, Culture & Language*, 1–14.
- Assapari, M. M. (2014). Eksistensi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Perkembangannya di Era Globalisasi. *Prasi*, 9(35), 29–37. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/PRASI/article/view/8943/5776>
- Badan Bahasa. (2016). Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. Retrieved from <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/1593/pengutamaan-bahasa-indonesia-di-ruang-publik>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2022). Ejaan yang Disempurnakan V.
- Blommaert, J. (2013). *Ethnography, Superdiversity, and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity*. Bristol: Multilingual Matters. <https://doi.org/10.21832/9781783090419>
- Dasuki, S., dkk. (2015). Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia 2015*, 255--266.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fatmahwati. (2019). Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Media Ruang Publik Di Kota Pekanbaru. *Suar Betang*, 13(2), 131–144. <https://doi.org/10.26499/surbet.v13i2.76>
- Hantono, D., & Ariantantrie, N. (2018). Kajian Ruang Publik dan Isu yang Berkembang di Dalamnya. *Vitruvian*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.22441/vitruvian.2018.v8i1.005>
- Hendrastuti, R. (2015). Variasi Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di Kota Surakarta (The Language Uses Variation at Surakarta Public Space). *Kandai*, 11(1), 29–43.
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), 23–49. <https://doi.org/10.1177/0261927X970161002>
- Lynch, K. (1960). *The Image of the City*. Massachusetts: The Massachusetts Institute of Technology Press.
- Mahsun. (2005). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mahsun. (2015). *Indonesia dalam Perspektif Politik Kebahasaan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Malik, A. (2018). Ruang Publik sebagai Representasi Kebijakan dan Medium Komunikasi Publik. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 6(2), 82–88. <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i2.914>
- Maryanto. (2018). *Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara "Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimens Bahasa, Sejarah, dan Hukum."* (dkk Maryanto, Ed.). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Retrieved from https://www.academia.edu/38175552/Prosiding_Semiloka_UN_S_2018_DENGAN_SAMPUL_pdf?auto=download&email_work_card=download-paper
- Mulyana, D. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, (007313), 1–28.
- Purnanto, D., Yustanto, H., Ginanjar, B., & Ardhian, D. (2021). English Operation in Public Space: Linguistic Landscape in Culinary Business of Surakarta, Indonesia. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 18(1), 345–360. <https://doi.org/10.52462/jlls.186>
- Sahril, dkk. (2019). Lanskap Linguistik Kota Medan: Kajian Onomastika, Semiotika, Dan Spasial. *MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan*. <https://doi.org/10.26499/mm.v17i2.2141>
- Sasangka, S. S. T. W. (2018). *Gapura Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Elmatara.
- Spolsky, B., & Cooper, R. (1991). The Languages of Jerusalem (pp. 433–449). Oxford: Clarendon Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198239086.001.0001>
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas. *Jurnal Kajian*

- Jurnalisme*, 1(1), 1–20.
<https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228>
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Wahyuni, S. (2016). Representasi Kekuasaan dalam Imbauan di Ruang Publik. *Widyaparwa*, 44(1), 41–50.
<https://doi.org/10.26499/wdprw.v44i1.114>
- Widiyanto, G. (2020). Meneroka Lanskap Linguistik: Kasus di Stasiun Solo Balapan Surakarta. *Unika Atma Jaya*, (1997), 177–182.
- Yogyakarta, D. K. K. (2021). Perjanjian Giyanti. Retrieved from <https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/perjanjian-giyanti>